

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdullah, Taufik. 1997. *Minangkabau: Sejarah dan Budaya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Cabrera Medaglia, Jorge dan Christian López Silva. 2007. *Mengatasi Masalah Akses: Melindungi Sumber, Sambil Memberi Kepastian kepada Pengguna*. Makalah Kebijakan dan Hukum Lingkungan IUCN No. 67/2. Kelenjar: IUCN.
- Merpati, Michael R. 2011. *Pohon Pisang di Gerbang: Sejarah Masyarakat Marjinal dan Pasar Global di Kalimantan*. Yale University Press.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Endang Hanani et al. 2005. *Identifikasi Senyawa Antioksidan dalam Spons Callyspongia sp dari Kepulauan Seribu*. Jakarta: UI Press.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbitan Bayumedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nasroen, M. 1957. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Pasaman.
- Pramono Hariadi et al. 2015. *Etnobotani Masyarakat Minangkabau: Pemanfaatan Tumbuhan untuk Obat dan Upacara Adat*. Padang: Universitas Andalas Press.
- Sati, Dt. Bagindo. 2005. *Adat dan Sistem Pemerintahan Nagari Minangkabau*. Padang: Yayasan Pustaka Indonesia.
- Siwa, Vandana. 1997. *Biopiracy: Penjarahan Alam dan Pengetahuan*. Boston: South End Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

- Convention on Biological Diversity* (CBD). 1992.

Protokol Nagoya tentang Akses ke Sumber Daya Genetik dan Pembagian Manfaat yang Adil dan Adil yang Timbul dari Pemanfaatannya. 2010.

United Nations Declaration on the Indigenous Peoples (UNDRIP). 2007.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Tahun 1994

World Intellectual Property Organization (WIPO) Tahun 2024

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

C. Jurnal

Coombe, Rosemary J. 2001. "Pengakuan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat dan Masyarakat dalam Hukum Internasional". *Tinjauan Hukum St. Thomas* Vol. 14 No. 2.

Long, Doris Estelle. 2012. "Pengetahuan Tradisional dan Perjuangan untuk Domain Publik". *Jurnal Hukum, Teknologi & Kebijakan* Vol. 2012 No. 2.

Martin GI et al. 2014. "Metode Inventarisasi Sumber Daya Genetik Tumbuhan melalui Pendekatan Etnobotani". *Jurnal Biodiversitas* Vol. 15 No. 3.

Posey, Darrell A. 1990. "Hak Kekayaan Intelektual dan Kompensasi yang Adil untuk Pengetahuan Pribumi". *Antropologi Hari Ini* Vol. 6 No. 4.

Ragavan, Srividhya. 2001. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional". *Tinjauan Kekayaan Intelektual Minnesota* Vol. 2 No. 1.

Redford, Kent H. dan Brian D. Richter. 1999. "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Dunia Penggunaan". *Biologi Konservasi* Vol. 13 No. 6.

von Benda-Beckmann, Franz. 1989. "Warisan Matrilineal dan Adat Minangkabau". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* Vol. 145 No. 1.

Yonariza et al. 2016. "Sistem Pertanian Tradisional Minangkabau dan Pengelolaan Hutan Adat". *Jurnal Agraria* Vol. 8 No. 2.

Muda, Tomme Rosanne. 2013. "Perspektif Kerjasama Internasional tentang Implementasi Protokol Nagoya". *Jurnal Hukum, Lingkungan dan Pembangunan* Vol. 9 No. 1.

D. Internet dan Dokumen Lainnya

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). 2023. "Karakteristik Masyarakat Adat di Indonesia". Laporan AMAN. Diakses dari <https://www.aman.or.id/karakteristik/>, pada tanggal 10 Januari 2026.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). 2023. "Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat". Diakses dari <https://www.aman.or.id/rancangan-uu/>, pada tanggal 10 Januari 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. 2022. *Data Pertanian Sumatera Barat*. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. 2022. *Keanekaragaman Hayati Sumatera Barat*. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat.

Forum Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Isu-isu Adat. 2023. "Definisi Masyarakat Adat". Diakses dari <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/>, pada tanggal 10 Januari 2026.

Institut Sumber Daya Dunia (WRI). 2018. *Biopiracy dan Pengetahuan Adat*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2022. *Laporan Tahunan Keanekaragaman Hayati Indonesia*.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 2023. "Akses Masyarakat Adat terhadap Bantuan Hukum". Laporan Komnas HAM. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/akses-hukum-adat/>, pada tanggal 25 Januari 2026.

Komite Antarpemerintah WIPO tentang Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Cerita Rakyat. 2026. "Tentang IGC". Diakses dari <https://www.wipo.int/tk/en/igc/>, pada tanggal 10 Januari 2026.

Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia. 2026. "Pengetahuan Tradisional". Diakses dari <https://www.wipo.int/tk/en/>, pada tanggal 10 Januari 2026.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). 2019. *Keadaan Keanekaragaman Hayati Dunia untuk Pangan dan Pertanian*. FAO.

Jam tangan Sawit. 2023. "Konflik Agraria dan Perampasan Tanah Adat di Sumatera Barat". Laporan Sawit Watch. Diakses dari <https://www.sawitwatch.or.id/konflik-agraria/>, pada tanggal 12 Januari 2026.

UNESCO. 2023. "Erosi Pengetahuan Tradisional di Masyarakat Adat". Laporan UNESCO tentang Warisan Budaya Takbenda. Diakses dari <https://ich.unesco.org/en/erosion-traditional-knowledge>, pada tanggal 18 Januari 2026.

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. 2023. "Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat". Laporan tahunan WWF. Diakses dari https://www.wwf.or.id/laporan_annual/, pada tanggal 15 Januari 2026.

Sawit Watch, "Konflik Agraria dan Perampasan Tanah Adat di Sumatera Barat", laporan Sawit Watch, diakses dari <https://www.sawitwatch.or.id/konflik-agraria/>, pada tanggal 18 Januari 2026.

